

## PENGELOLAAN WILAYAH DI INDONESIA Perspektif Kesejarahan dan Masa Kini<sup>1</sup>

I Ketut Ardhana<sup>2</sup>  
[phejepsdrliipi@yahoo.com](mailto:phejepsdrliipi@yahoo.com).

### *Abstrak*

*Studi wilayah adalah sebuah studi yang berkembang di Asia Tenggara oleh pandangan ahli-ahli Barat, terutama menjelang era Perang Dunia II. Signifikansi studi ini dirasakan penting tidak dalam konteks pengembangan wilayah itu pada awal mulanya, tetapi lebih banyak dipergunakan untuk tujuan perang. Oleh karena itu, tidak mengherankan mengapa studi wilayah ini dikembangkan terutama menjelang okupasi Jepang di Asia Tenggara dan yang sangat mengkhawatirkan bagi kepentingan Dunia Barat yang dianggap dapat mengancam eksistensinya di wilayah-wilayah koloninya. Namun demikian, setelah berakhirnya Perang Dunia II itu, ternyata keberhasilan mengembangkan studi kawasan dari sudut pandang Barat itu, berdampak pula terhadap komunitas lokal yang tidak hanya mencakup persoalan kepentingan politik saja, melainkan kepentingan-kepentingan lainnya seperti sosial budaya, hukum, ekonomi dan sebagainya dalam konteks kehidupan masyarakat yang dinamis dan dapat hidup secara berkelanjutan. Muncul beberapa pertanyaan dalam kaitannya dengan masalah studi wilayah ini yaitu: Pertama, mengapa kajian wilayah ini tidak berkembang di masa lalu, kedua: bagaimana manajemen pengelolaan wilayah dan ketiga apa dampak dari pengembangan wilayah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Inilah beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam makalah ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perlunya pengelolaan wilayah yang dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat tidak hanya di pusat-pusat kekuasaan, tetapi juga di kekuasaan di daerah yang termarjinalisasikan.*

*Kata Kunci: Studi wilayah (area studies), dinamika kesejarahan, migrasi, dan manajemen pengelolaan*

---

<sup>1</sup> Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Pengelolaan Wilayah yang diselenggarakan oleh Program Magister Administrasi Manajemen Negara Universitas Warmadewa di Aula Gedung Universitas Warmadewa pada tanggal 12 September 2016

<sup>2</sup> Guru Besar Sejarah Asia pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dan Wakil Presiden International Organization of Social Science Organisations (IFSSO)

## **I. Pendahuluan**

Proses sejarah dan migrasi telah membentuk kehidupan sebuah masyarakat di sebuah wilayah. Tidak mengherankan, jika karakteristik sebuah masyarakat tidak sama, tetapi mengalami perbedaan tergantung dari intensitas dari proses sejarah dan migrasi yang berlangsung dari dahulu hingga sekarang yang merupakan rentang waktu yang cukup lama. Karena dinamika yang berlangsung cukup intens dikarenakan berbagai faktor yang berkembang seperti aspek sosial budaya, agama, ekonomi dan politik maka dapat dipahami mengapa kehidupan masyarakat tersebut tidak selamanya dapat hidup secara damai, melainkan muncul riak-riak sosial bahkan konflik sosial yang apabila tidak dikendalikan dengan cepat dan tepat sasaran dapat memunculkan masalah disintegrasi bangsa.

Indonesia sebagai bangsa merupakan sebuah proses yang berlangsung lama, sepanjang sejarah umat manusia di Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis atau suku, tradisi, kepercayaan dan agama. Sebagai sebuah negara, Indonesia mengalami proses perjuangan yang cukup panjang yang pada akhirnya baru pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi sebuah negara yang merdeka dan negara modern (*modern state*). Pertanyaan yang perlu dibahas dalam kaitan ini adalah mengapa pengelolaan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diperbaiki? Kedua upaya-upaya yang hendaknya dilakukan, dan ketiga dampak yang diharapkan dari pengelolaan ini bagi kehidupan berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan, yang tidak terlepas dari kebijakan kehidupan bertetangga yang baik (*good neighbouring states*), di antara negara-negara di sekitarnya.

## **II. Paradigma tentang Pengelolaan Wilayah di Masa Lalu: Dari Perspektif Kosmologi hingga Kolonial**

Telah diketahui bahwa terdapat paradigma yang berbeda dalam melihat sebuah wilayah dalam konteks negara tradisional (*traditional states*) dan negara modern (*modern states*). Pada negara tradisional yang berbasis dengan sistem kerajaan atau kesultanan di Indonesia pada masa lalu melihat wilayah yang berpusat pada pusat kekuasaan. Demikian yang terjadi pada kerajaan atau kesultanan Mataram di Jawa yang berkonsentrasi dengan pusat kekuasaannya dan kurang memberikan perhatian pada wilayah dipinggirannya. Muncullah konsep *negara agung*, *kuta negara* dan *manca negara*. Ini jelas menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang berpusat pada

istana, sehingga tidak jarang wilayah-wilayah yang berada di wilayah perbatasannya, karena kurang mendapat perhatian dari pusat kekuasaannya maka beralih untuk mengikuti wilayah-wilayah negara tetangganya.

Mengelola sebuah wilayah apalagi dalam konteks wilayah Indonesia yang sangat luas yang apabila dibentangkan di peta dapat disejajarkan dengan rentangan wilayah dari San Francisco sampai ke Istanbul di Turki. Ini tentu adalah sebuah wilayah geografi yang sangat luas. Di masa lalu, pengelolaan wilayah Indonesia di masa penjajahan negara barat juga tidak dilakukan dengan baik. Salah satu sebabnya adalah memang penguasa kolonial pada saat itu merasa masih kekurangan sumber daya manusia untuk mengaturnya.

Tidak mengherankan jika pusat kekuasaan penjajahan saat itu hanya dikonsentrasikan di Indonesia di Bagian Barat daripada di Indonesia Bagian Timur. Selain masalah strategis seperti jumlah penduduk dan adanya pusat-pusat kekuasaan pada saat itu di Indonesia Barat, memang di Indonesia bagian Timur tampak menghadapi kendala seperti faktor geografis dimana sebagian besar wilayahnya merupakan daerah semiarid dan memiliki tingkat kesuburan tanah yang rendah. Oleh karena itu, pada masa kekuasaan kolonial Belanda pengelolaan wilayah seperti menyebut Jawa dan Sumatra disebutnya sebagai wilayah yang dikelola untuk “masa kini” sedangkan wilayah Kalimantan dan Sulawesi dan yang lainnya sebagai wilayah yang dikelola untuk “masa depan”. Dapat dibayangkan, bagaimana kebijakan pengelolaan wilayah Indonesia pada saat itu, sudah direncanakan dengan baik, sesuai dengan kepentingan kekuasaan penjajahan Barat.

### **III. Pengelolaan Wilayah di Masa Kini dan Pendekatan Pembangunan yang Berkelanjutan**

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, bahwa meskipun terbentuknya sebuah negara modern Indonesia ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1945, namun kehidupan sebagai bangsa dalam artian tetap eksistnya kehidupan komunitas adat sebelumnya, yang tampaknya masih tetap dilanjutkan. Ini menandakan bahwa pemerintah dalam arti (*government*) tampak mengapresiasi keberadaan etnis yang beraneka ragam dengan kekayaan tradisi sosial budaya, ekonomi, hukum dan politik yang telah dimilikinya itu. Negara (*state*) juga sudah menjamin akan keberadaannya itu sesuai dengan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.



Setelah berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia itu, ini tidak berarti pula bahwa kehidupan yang berlangsung di daerah-daerah kemudian mengalami perubahan drastis. Ini berarti, relasi sosial budaya yang sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang tampaknya masih dilanjutkan. Sebuah pengalaman ketika melaksanakan penelitian masalah pengelolaan wilayah perbatasan di Nunukan dapat diceritakan sebagai berikut. Memang pada tahun 2000-an, lagi gencar-gencarnya masalah konflik perbatasan antara Malaysia dan Indonesia mengenai masalah Pulau Sipadan dan Ligitan, kemudian dilanjutkan dengan konflik Blok Ambalat.

Meskipun konflik berlangsung di tataran lingkaran elit antara Malaysia dan Indonesia, tampaknya di akar rumput (*grass roots*) tampaknya konflik yang dibayangkan “mengerikan” itu tidaklah terjadi. Rumor tentang pengiriman tentara pun santer terdengar, namun komunitas masyarakat yang ada di wilayah perbatasan tidak merasa ketakutan dan merasa yakin bahwa perang tidak akan pernah terjadi. Pertanyaannya adalah mengapa persepsi itu begitu diyakini? Apa yang melatarbelakanginya? Dan, bagaimana mereka menyikapi terhadap situasi itu berdasarkan pengalaman yang pernah dialaminya terhadap persoalan pengelolaan wilayah baik di masa Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi?

Dalam dinamika masyarakat yang menetap di perbatasan seperti wilayah-wilayah seperti di Kepulauan Sangir Talaud, Batam, Pulau Nunukan, dan Pulau Sebatik, relasi sosial budaya yang pernah terjadi memang lebih tua dari umur negara ini. Tidak mengherankan, jika hubungan kawin mawin, di antara etnis yang ada di wilayah itu tidak pernah dipermasalahkan, dimana hubungan etnisitas sudah berlangsung cukup lama. Bahkan, di wilayah Nunukan dan Sebatik dimana karena keadaan alam dan aspek pembangunan yang belum berkembang menyebabkan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan sudah dilakukan melalui hubungan etnisitas ini.

Jika, naik pesawat udara dari Kuala Lumpur menuju ke Khatulistiwa dapat dilihat dari udara, bagaimana wilayah Kalimantan bagian Malaysia menghijau ditanami kelapa sawit, sementara Kalimantan bagian Indonesia terlihat compang camping akibat bekas-bekas perusahaan tambang yang ditinggalkan. Ini adalah keadaan yang menyedihkan melihat perbandingan antara Kalimantan Malaysia dan Kalimantan Indonesia. Ini sebagai salah satu dampak paradigma kekuasaan masa lalu yang lebih menekankan pentingnya pusat kekuasaan daripada mementingkan wilayah-wilayah yang jauh di perbatasan, yang sering dianggap sebagai daerah tertinggal, terpinggirkan, dan terbelakang (*underdeveloped regions*). Ini berarti, bahwa dengan

acara berkunjung ke rumah kakek nenek, saudara mereka memperdagangkan komoditas atau barang yang dihasilkan di wilayahnya.

Tentu barang-barang yang dibawa seperti hasil pertanian dan kerajinan tangan, sementara barang-barang yang dibeli dari negeri tetangga (negeri Jiran) berupa kebutuhan pokok sehari-hari seperti supermie, gas, barang elektronik dan sebagainya. Memang di masa lalu, pemerintah pusat bukannya tidak membantu pada wilayah ini, namun bantuan yang diberikan berupa sembilan kebutuhan pokok seperti gula, beras, sabun dan lain-lain tetapi sekitar tiga bulan sekali, melalui kapal laut dari pelabuhan di Surabaya dan kemudian ke Kalimantan.

Akan tetapi, jika terjadi cuaca karena musim badai yang terjadi di kawasan Laut Jawa, sehingga kapal-kapal laut pengangkut bahan sumbangan itu tidak berani berlayar, maka dibayangkan jika harapan akan datangnya bantuan itu juga tidak muncul-muncul. Belum lagi, kondisi transportasi atau infrastruktur yang tidak memadai baik di darat, sungai maupun di laut.

Transportasi laut yang masih tidak memadai pada tahun 2000-an dapat digambarkan dengan tidak adanya pesawat-pesawat besar yang dapat berkunjung ke wilayah ini seperti di Long Bawan (dahulu masuk bagian Kalimantan Timur, sekarang menjadi bagian Propinsi Kaltara atau Propinsi Kalimantan Utara), yang berbatasan dengan Ba Kelalan di Serawan Malaysia. Umumnya yang digunakan adalah pesawat kecil seperti Trigana dan dengan jumlah penumpang yang terbatas sekitar 14 orang belum lagi barang-barang pertanian bahkan ada yang mengangkut ternak. Bahkan, jika ada pasien yang sakit, maka pasien inilah yang diprioritaskan daripada penumpang yang sudah membeli tiket jauh-jauh sebelumnya. Dengan demikian tidak bisa dipastikan mengenai keberangkatan seorang penumpang, jika masalah ini masih tetap berlanjut. Untuk itu, maka perbekalan harus cukup karena ATM juga tidak tersedia di wilayah perbatasan. Jadi pengelolaan wilayah perbatasan ini masih sangat tidak memadai, jika dilihat infrastruktur yang ada dimana masih belum adanya akses jalan yang menghubungkan antara wilayah yang satu dengan yang lainnya di Kalimantan.

Dalam hal transportasi laut misalnya dapat dikatakan bahwa pedagang mengikuti irama air laut. Barang-barang yang akan diperdagangkan ke Tawau Malaysia dari Sebatik Indonesia biasanya menunggu kapal-kapal yang membawa barang-barang dagangan dari Malaysia. Setelah kapal datang, mereka pun menunggu juga sampai air laut pasang, sehingga kapal-kapal dapat ditarik ke sungai yang dekat dengan pantai untuk dapat menurunkan barang-barang dari Malaysia. Demikian juga sebaliknya, jika barang-barang pedagang yang sudah dinaikkan ke

kapal tidak dapat berlayar, karena menunggu air pasang lagi supaya kapal-kapal perahu itu dapat ditarik ke tengah laut. Hubungan perdagangan seperti ini dapat dikategorikan sebagai “perdagangan air pasang surut”, yang belum dikelola secara profesional.

Banyak kendala yang masih dihadapi dalam upaya bagaimana mengelola sebuah wilayah agar dapat berdaya saing dengan negara-negara tetangga. Ketergantungan dengan negara tetangga memang tidak dapat dihindari melihat kondisi geografis, sumberdaya manusia, fasilitas infrastruktur yang ada yang jauh dari memadai. Dalam hal sumberdaya manusia misalnya dapat dicontohkan bagaimana kelemahan ketrampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan tenaga kerja yang berasal dari Filipina misalnya sebagaimana Daud mencatat sebagai berikut:

*“With the influx of Indonesian workers especially during the last few years, they have become the dominant foreign workforce on almost all plantations. With large concentration, they tend to become organized in a gang-like fashion and demanding. They “down tools” readily and cause industrial unrest on plantations. They have become selective, choosing to carry out only jobs that offer the highest rates of pay which in turn, creates big problems for the management to realize the completion of the work programmes. The tendency to abscond is prevalent among Indonesians, who with their excellent network of communications and movement within the country, pay scant regard to rules and regulations and often exhibit a “tidak apa” attitude towards documentation. They appear to be prepared to be illegal workers if it means earning more and not paying the levy to the government. Many of them believe that even if they were caught illegally, they would merely be detained and sent home to Indonesia without any other punishment.”*

Bagi tenaga kerja Indonesia di samping masih lemah dalam hal ketrampilan juga memiliki kelemahan dalam penguasaan bahasa asing. Kondisi tenaga kerja ini tidak mengherankan jika tenaga kerja Filipina lebih diperhatikan dan ditempatkan di tempat-tempat tertentu seperti rumah sakit, restaurant, sementara tenaga kerja Indonesia ditempatkan di halaman belakang kebun-kebun kelapa sawit. Ketergantungan tentang masalah tenaga kerja dari luar bagi Malaysia dideskripsikan oleh Daud Amatzin (2004: 2) sebagai berikut:

*“the labor shortage in Malaysia is becoming a serious threat to the ....development of the nation's economy (The Planter, Kuala Lumpur 1980).*

*“the single most pressing issue facing the plantation industry is shortage of labor (ISIS Conference, Kuala Lumpur, 1992).*

*“the biggest issue facing the oil palm industry today is the shortage of workers” (ISP International Planters Conference, Kuala Lumpur, 2000).*



Adanya ketimpangan dalam penyediaan tenaga kerja di Malaysia juga menjadi faktor ketergantungan Malaysia terhadap kedatangan tenaga kerja Indonesia. Bagi tenaga kerja Indonesia, bekerja di Malaysia dianggapnya lebih menguntungkan, karena pekerjaan dalam kerja kasar tampaknya dikerjakan oleh orang Indonesia, sementara orang Malaysia jarang yang mau mengerjakannya. Di samping itu, adanya rasa persaudaraan karena adanya kesamaan etnisitas menyebabkan jarang terjadi konflik di antara pemberi kerja dan tenaga kerjanya. Namun yang menjadi catatan adalah bahwa posisi tawar menawar tenaga kerja Indonesia tampaknya rendah dibandingkan dengan tenaga kerja yang berasal dari negara lainnya. Untuk itu, pemberian bekal ketrampilan amatlah penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

#### **IV. Simpulan**

Dari gambaran ini dapat dijelaskan, bahwa tampaknya pemerintah Indonesia yang memiliki komponen pemerintah, pengusaha dan masyarakat lokal sebaiknya memikirkan konsep pengelolaan wilayah yang tidak hanya di hulu saja, tetapi mulai memikirkan pembangunan yang berlanjut dari hulu ke hilir. Misalnya saja bagaimana para pengusaha dan pekebun mampu mengelola tanaman kelapa sawit, tetapi pada masa pasca panen (*post harvest*) hendaknya dapat mengembangkan industry-industri meskipun berskala kecil, akan tetapi mampu mengembangkan kemana produk hasil kelapa sawit itu hendaknya dikelola, misalnya membuat produk-produk lain yang bahannya dari kelapa sawit. Ini dimaksudkan bahwa pekebun kelapa sawit tidak hanya memasarkan produknya ke negara tetangga saja, tetapi juga dapat dikelola di wilayah Indonesia sendiri. Dalam hal pendidikan yang berkelanjutan, hendaknya mulai dipikirkan ketrampilan pendidikan apa yang perlu dikembangkan di perbatasan misalnya seperti sekolah-sekolah ketrampilan sehingga sustainable dengan alam lingkungan dimana mereka berada. Hanya dengan memperhatikan kemampuan lokal yang berlandaskan kearifan lokal, maka pengelolaan pembangunan wilayah itu dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan.

## SELECTED REFERENCES

- Ardhana, I Ketut. 2013. "Early Harbours in Eastern Nusa Tenggara", in John N. Miksic and Goh Geok Yian, *Ancient Harbours in Southeast Asia: The Archaeology of Early Harbours and Evidence of Inter-Regional Trade*. Bangkok: SEAMEO SPAFA Regional Centre for Archaeology and Fine Arts.
- Ardhana, I Ketut. 2005. *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915—1950*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ardhana, I Ketut. 2000. *Nusa Tenggara Nacheinrichtung der Kolonialherrschaft*. Passau-Germany: Lehrstuhl für Sudostasienkunde Philosophische Fakultät Universität Passau.
- Cortesao, Armando. 1944. *The Suma Oriental of Tome Pires: An Account of the East from the Red Sea to Japan. Written in Malacca and India in 1512—1515 and the Book of Fransisco Rodrigues: Rutter of Voyage in the Red Sea, Nautical Ruler, Almanack and Maps, written and drawn in the East Before 1515*, 1. Nendeln/ Liechtenstein: Kraus Reprint Limited.
- Dahm, Bernhard. 1966. *Sukarnos Kampf um Indonesiens Unabhängigkeit*. Berlin/ Frankfurt am Main: Alfred Metzner Verlag.
- Fox, J. J. 1977. *Harvest of the Palm: Ecological Change in Eastern Indonesia*. Cambridge: Harvard University Press.
- Ide Anak Agung Gde Agung. 1985. *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Goethals, Peter R. 1961. *Aspect of Local Government in a Sumbawan Village (Eastern Indonesia)*. New York: Southeast Asia program Department of Far Eastern Studies, Cornell University.
- ISIS Conference, Kuala Lumpur, 1992.*
- ISP International Planters Conference, Kuala Lumpur, 2000.*
- Klerck, E. S. de. 1925. *History of the Netherlands East Indies*. Amsterdam: B. M. Israel NV.
- Kuitenbrouwer, Maarten. 1991. *The Netherlands and the Rise of Modern Capitalism: Colonies and Foreign Policy, 1870—1902*. New York: St. Martin's Press.
- Lebar, Frank M. *Ethnic Groups of Insular Southeast Asia. Vol. I: Indonesia, Andaman Islands, and Madagascar*. New Haven: Human Relations Area Filoes Press.
- Locher-Scholten, Elsbeth. 1994. *Sumatraans Sultanaat en Koloniale Staat*. Leiden: KITLV Uitgeverij.



Middendorp. W. 1929. "The Administration of the Outer Provinces of the Netherlands Indies", in B. Schrieke. *The Effect of Western Influence on Native Civilizations in the Malay Archipelago*. Batavia: G. Kolff & Co.

"Ontwerp van Kopermijn Ontginning op het eiland Timor" Leyden: De Breuk: Smits, 1869.

Patot, A. Tissot, van. 1907. "Kort Overzicht van de gebeurtenissen of Flores en eenige gegevens betreffende dat eiland", *IMT*, 38.

Schulte-Nordholt, H. G. 1971. *The Political System of the Atoni of Timor* (VKI), 60. The Hague: Martinus Nijhoff.

*The Planter, Kuala Lumpur* 1980.

"Varia: Kort overzicht van de onregelten op het eiland Sumba", *Indisch Military Tijdschrift* (IMT).

Wetering, W. F. van de. 1926. "De Savoenezen", *BKI*, 82.

#### CURRICULUM VITAE:

**I Ketut Ardhana** is Professor of Asian History in the Faculty of Humanities Studies– Udayana University. He was the former Head of the Southeast Asia Division-Research Center for Regional Resources- the Indonesian Institute of Sciences, Jakarta (PSDR-LIPI), 2001-2009. His research project is on tourism and border studies in the Southeast Asian region, including: Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapore and the Philippines. Previously he took the English course at the School of Oriental and African Studies, (SOAS) - University of London-England (1990), at the University of Belconnen in Canberra-Australia (1992), the Dutch course at Erasmus Huis, Universiteit te Leiden in the Netherlands (1990), and the German course at the Goethe Institute in Mannheim and at Passau University (UP) in Germany (1996-1997).

He studied history in the Faculty of Letters in the Department of History at Udayana University, Denpasar, Bali- and continued his studies to obtain the Drs. (Doctorandus Degree) at the Faculty of Letters – Gadjah Mada University (UGM) in Yogyakarta in 1985. He graduated with his Master's Degree (Master of Arts in Asian Studies) at Southeast Asian Centre-Faculty of Asian Studies, the Australian National University (ANU) in Canberra, Australia in 1994. Then got his PhD degree or Dr. phil. (Doctor Philosophic) at *Sudostasoenkunde, Philosophische Fakultät*, Universitat Passau in Germany with the predicate *Magna Cum Laude* in 2000. He was granted a Fellowship to carry out research in area studies at the University of Passau in Passau- Germany in 2003 and also a Fellowship in the Centre for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University, Kyoto, Japan, in 2004.

He was a Committee member on the collaborative project between Indonesia and the Netherlands at NIOD (*Nederlandsch Instituut voor Oorlog Dokumentatie*) or the Dutch Institute for War Documentation) from 2004 until 2009. He has been a member of IFSSO (International Federation of Social Science Organizations) from 2003 until now and was elected as the first Vice President. In Seijo University in Tokyo, in 2015, he was elected as the second Vice President. He is also a founding member of the World SSH (World Social Sciences and Humanities) and presented his paper in Buenos Aires, Argentine, in 2010. He wrote an article on the "Review of *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War: In cooperation with the Netherlands Institute for War Documentation*" in the *Journal of Indonesia*, Vol. 91, 2011 published in Cornell, the US and one on "Early Harbours in Eastern Nusa Tenggara", in John N. Miksic and Goh Geok Yian. *Ancient Harbours in Southeast Asia: The Archaeology of Early Harbours and Evidence of Inter-Regional Trade* for the Bangkok SEAMEO SPAFA Regional Centre for Archaeology and Fine Arts in 2013. He was appointed the Head of the Center for Bali Studies at Udayana University in Denpasar, Bali, in 2010, a position he still holds.